



Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Dafillah Vike Eryana

Politeknik Negeri Jember

Dwi Fera Istiqomah

Politeknik Negeri Jember

Olivia Anandyta

Politeknik Negeri Jember

Zida Rizqi Amalia

Politeknik Negeri Jember

Alamat: Jl. Mastrip 164 Jember, Jawa Timur, Indonesia

Korespondensi penulis: d42221860@student.polije.ac.id

Abstrak. *This study aims to analyze the effect of Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), and Capital Expenditure on the financial performance of district / city governments in Bali Province in 2018-2021. The method used is multiple linear regression analysis with a quantitative approach, using secondary data obtained from the realization report of the Regional Budget (APBD). The results showed that partially only PAD had a significant effect on regional financial performance, while DAU and Capital Expenditure had no significant effect. But simultaneously, the three variables together have a significant effect on the financial performance of local governments.*

Keywords: *Capital Expenditure; Financial Performance; General Allocation Fund; Regional Original Revenue*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2018–2021. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial hanya PAD yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan DAU dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan. Namun secara simultan, ketiga variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: *Belanja Modal; Dana Alokasi Umum; Kinerja Keuangan; Pendapatan Asli Daerah*

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengelola pembangunan di wilayahnya masing-masing secara mandiri. Penerapan otonomi daerah ini memungkinkan terjadinya efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya keuangan daerah. Ciri utama dari daerah otonom yang sukses dalam menjalankan otonomi adalah kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki serta pengelolaan keuangan daerah yang baik dan tepat sasaran.

Salah satu aspek yang menjadi tolok ukur keberhasilan otonomi daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, yang tercermin dalam kinerja keuangan. Kinerja keuangan daerah menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu

menggali potensi pendapatan, mengelola anggaran, dan mengalokasikan belanja secara tepat sasaran untuk mencapai tujuan pembangunan. Oleh karena itu, pengukuran dan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan menjadi sangat penting, terutama dalam konteks pemerintahan kabupaten/kota di daerah strategis seperti Provinsi Bali.

Provinsi Bali memiliki karakteristik ekonomi yang khas, dengan sektor pariwisata sebagai penopang utama perekonomian daerah. Ketergantungan tinggi terhadap sektor ini menjadikan Bali sangat rentan terhadap guncangan eksternal, seperti bencana alam, fluktuasi global, maupun pandemi. Hal ini berdampak langsung pada pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari pajak hotel, restoran, hiburan, dan retribusi jasa wisata. Ketika aktivitas pariwisata terganggu, PAD mengalami penurunan yang signifikan, yang pada gilirannya mempengaruhi kapasitas fiskal daerah dalam membiayai program pembangunan.

Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi daerah yang dimilikinya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dijadikan sumber pendapatan daerah. PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD dianggap sebagai alternatif sumber pendanaan daerah yang dipergunakan oleh daerah sebagai pengeluaran untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan guna memperkecil ketergantungan daerah terhadap subsidi dari pemerintah pusat.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU suatu daerah ditentukan atas dasar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dengan potensi daerah (fiscal capacity), DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada. Jumlah DAU secara keseluruhan ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Dalam anggaran belanja modal, Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh karena akan lebih cenderung digunakan untuk menambah aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik (Rini, 2011).

Di sisi lain, Belanja Modal juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah. Belanja modal adalah investasi pemerintah daerah dalam bentuk pengadaan atau pembangunan aset tetap seperti jalan, jembatan, gedung, dan infrastruktur publik lainnya. Belanja ini bersifat strategis karena memberikan manfaat jangka panjang dan menjadi pondasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal serta peningkatan kualitas layanan publik. Jika dikelola dengan baik, belanja modal tidak hanya meningkatkan nilai aset daerah tetapi juga memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui efek pengganda ekonomi.

Dalam rangka mengelola keuangan daerah secara optimal, diperlukan analisis dan evaluasi yang mendalam terhadap kinerja keuangan daerah dengan mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menjadi dasar penguatan pengelolaan keuangan tersebut. Pengukuran kinerja keuangan ini penting karena hasilnya dapat memberikan perspektif tambahan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah bertindak sebagai pengelola atau manajer

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

keuangan yang bertanggung jawab menjalankan tugas dan wewenang untuk mencapai tujuan daerahnya. Kinerja keuangan daerah mencerminkan kemampuan daerah dalam mencapai tujuan tersebut. Menurut Mardiasmo (2010), pengukuran kinerja adalah sistem yang membantu manajer publik menilai pencapaian strategi melalui indikator finansial dan nonfinansial. Oleh karena itu, pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai sejauh mana manajer dan pegawai pemerintah menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien, dan efektif sesuai anggaran yang telah ditetapkan, sekaligus meningkatkan pelayanan publik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Penelitian ini dilakukan karena masih adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Analisis PAD dilakukan guna melihat seberapa besar pengaruh yang dihasilkan oleh masing-masing variabel tersebut terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting dilakukan karena merupakan cerminan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2018 - 2021.

KAJIAN TEORI

2.1 Teori Keagenan

Menurut Haryanto et al. (2022), teori keagenan merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara pihak agen dan prinsipal, di mana pihak prinsipal memberikan kepercayaan, amanah, atau instruksi kepada agen untuk melaksanakan tugas tertentu atas nama prinsipal. Dalam hubungan ini, agen bertindak sebagai pelaksana dari mandat yang diberikan oleh prinsipal. Eisenhardt (1998) dalam Nurmalita (2016) menambahkan bahwa teori ini fokus pada bagaimana struktur hubungan kerja antara pihak yang memberi tugas (prinsipal) dan pihak yang menjalankan tugas (agen) dapat diatur secara efektif. Dalam pemerintahan, teori ini diterapkan pada pemerintah pusat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen yang mengelola APBD untuk meningkatkan pelayanan publik dan kinerja keuangan daerah melalui desentralisasi fiskal dan dana transfer.

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, PAD adalah hak yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan dianggap sebagai penambahan terhadap kekayaan bersih daerah. Pendapatan ini berasal dari pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset yang dipisahkan oleh pemerintah daerah, dan pendapatan sah lainnya. PAD menjadi indikator utama otonomi daerah dan kemandirian fiskal, karena semakin besar kontribusinya dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan, semakin mandiri daerah tersebut. PAD bersumber dari kekuatan ekonomi lokal dan menjadi tulang punggung pendanaan daerah, sehingga semakin tinggi PAD, ketergantungan daerah pada dana pusat semakin berkurang.

2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah blok hibah dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pelayanan publik dan pembenahan tata ruang, dengan pemerintah daerah bertanggung jawab penuh atas penggunaannya. David & Priyo (2007) menyebutkan bahwa DAU diberikan oleh pemerintah pusat untuk mendanai pembenahan tata ruang wilayah dan peningkatan layanan publik. Perhitungan DAU didasarkan pada alokasi dasar (gaji pegawai) dan celah fiskal

(perbedaan antara kapasitas fiskal termasuk PAD dan dana bagi hasil dengan kebutuhan fiskal yang meliputi faktor demografis dan ekonomi). Desain transfer ini harus mengedepankan otonomi, penerimaan memadai, keadilan, transparansi, kesederhanaan, dan insentif agar daerah dapat mandiri dan meningkatkan pelayanan publik.

2.4 Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal mencakup pengeluaran untuk memperoleh aset yang memberikan manfaat dalam lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal juga mencakup pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah yang bersumber dari anggaran daerah untuk memperoleh atau menambah aset tetap dalam APBD. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018 (2018) aset tetap tersebut digunakan untuk kegiatan operasional instansi atau dinas dan tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat umum. Belanja modal meliputi pembangunan dan pengadaan infrastruktur seperti jalan, irigasi, peralatan, mesin, dan bangunan yang bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan. Perhitungannya mencakup belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya, yang dikelompokkan ke dalam kategori belanja tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

2.5 Kinerja Keuangan

Sejauh mana pengelolaan keuangan daerah mencapai tujuan, sasaran, dan visi dan misi disebut kinerja keuangan. Menurut Mahsun (2006), Kinerja Keuangan didefinisikan sebagai tingkat pencapaian dalam pelaksanaan program kebijakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, kinerja adalah hasil atau output dari program yang telah atau akan dicapai, yang diukur berdasarkan kuantitas dan kualitas terkait dengan penggunaan anggaran. Kinerja keuangan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran untuk mencapai tujuan dan pelayanan publik. Pengukurannya penting sebagai dasar evaluasi pembangunan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan. Salah satu indikatornya adalah tingkat desentralisasi fiskal, yang dihitung dari rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi PAD, semakin tinggi pula kemandirian fiskal daerah. Desentralisasi fiskal mendukung otonomi daerah dengan meningkatkan efisiensi, partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik. Menurut UUD 1945 Pasal 18, pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan perangkatnya yang membentuk Badan Eksekutif Daerah, mencakup tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai metode analisis data. Teknik ini dipilih karena mampu mengukur sejauh mana pengaruh lebih dari satu variabel independen secara simultan terhadap satu variabel dependen. Penggunaan regresi linier berganda memungkinkan peneliti untuk mengetahui kontribusi masing-masing variabel bebas dalam mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Adapun bentuk umum dari persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y=b_0+b_1X_1+b_2X_2+b_3X_3+c$$

Keterangan :

Y = Kinerja Keuangan

X₁ = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X₂ = Dana Alokasi Umum (DAU)

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

X_3 = Belanja Modal

b_0 = Konstanta Regresi

b_1, b_2, b_3 = Koefisien Regresi untuk masing-masing variabel independen

e = Error atau penyimpangan residual

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian hipotesis mencakup:

a. Uji t

Uji t digunakan untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel bebas, yaitu PAD, DAU, dan belanja modal terhadap variabel terikat secara individual. Uji ini dilakukan pada tingkat signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0,05$), yang berarti bahwa hasil dianggap signifikan jika nilai probabilitas (p-value) kurang dari 0,05.

Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:

1) PAD (X_1)

$H_{01}: \beta_1 \leq 0 \rightarrow$ Tidak terdapat pengaruh signifikan PAD terhadap kinerja keuangan

$H_{a1}: \beta_1 > 0 \rightarrow$ Terdapat pengaruh positif signifikan PAD terhadap kinerja keuangan

2) DAU (X_2)

$H_{02}: \beta_2 \leq 0 \rightarrow$ DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

$H_{a2}: \beta_2 > 0 \rightarrow$ DAU berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan

3) Belanja Modal (X_3)

$H_{03}: \beta_3 \leq 0 \rightarrow$ Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

$H_{a3}: \beta_3 > 0 \rightarrow$ Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan

4. Kriteria Pengambilan Keputusan

Jika p-value $> 0,05 \rightarrow$ Hipotesis nol diterima, artinya variabel bebas tidak berpengaruh signifikan

Jika p-value $< 0,05 \rightarrow$ Hipotesis nol ditolak, artinya variabel bebas berpengaruh signifikan

b. Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk mengevaluasi pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji ini penting untuk mengetahui apakah model regresi yang dibangun secara keseluruhan layak untuk digunakan dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hipotesis yang diuji:

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0 \rightarrow$ Tidak terdapat pengaruh simultan yang signifikan dari PAD, DAU, dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan

$H_a:$ Setidaknya salah satu $\beta \neq 0 \rightarrow$ Terdapat pengaruh simultan yang signifikan dari ketiga variabel bebas terhadap kinerja keuangan

Kriteria pengambilan keputusan:

Jika p-value $> 0,05 \rightarrow$ Model regresi tidak signifikan secara simultan

Jika p-value $< 0,05 \rightarrow$ Model regresi signifikan secara simultan

c. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R^2)

Koefisien determinasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Adjusted R Square, yang berfungsi untuk mengetahui seberapa besar variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model. Adjusted R² dianggap lebih tepat dibandingkan R² biasa karena mampu menyesuaikan nilai terhadap jumlah variabel bebas yang digunakan, sehingga lebih akurat dalam menilai kebaikan model regresi. Nilai Adjusted R² dapat bernilai negatif jika model regresi yang digunakan tidak sesuai, namun dalam penelitian yang ideal, nilai ini diharapkan bernilai positif dan tinggi, karena mencerminkan bahwa model yang digunakan mampu menjelaskan sebagian besar variasi dalam variabel dependen secara efektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum dan Objek

Pemerintah Provinsi Bali mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kinerja keuangan pemerintahan kabupaten/kota di Bali. Data keuangan tersebut biasanya diperoleh dari Laporan Realisasi APBD yang diakses melalui sistem keuangan daerah dan kementerian terkait, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari DJPK Kementerian Keuangan tahun 2025 dengan data yang ambil tahun 2018 – 2021 memiliki jumlah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan kinerja keuangan pemerintahan yang didapatkan dari kabupaten dan kota yang tersebar di Bali memiliki jumlah yang berbeda pada setiap kabupaten dan kota. Hal ini dikarenakan perbedaan penghasilan dan modal yang dibelanjakan setiap tahunnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri bersumber dari pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, dan pinjaman daerah di setiap Kabupaten dan Kota yang tersebar di Provinsi Bali. Berikut tabel yang menyajikan proses pengambilan sampel penelitian:

Kriteria	Jumlah
Kabupaten di Provinsi Bali	8
Kota di Provinsi Bali	1
Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	9
Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian (2018 – 2021)	45

Tabel 4.1 Perhitungan Jumlah Sampel Penelitian

No	Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Jembrana
2	Kabupaten Tabanan
3	Kabupaten Badung
4	Kabupaten Gianyar
5	Kabupaten Klungkung
6	Kabupaten Bangli
7	Kabupaten Karangasem

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

8	Kabupaten Buleleng
9	Kota Denpasar

Tabel 4.2 Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali

4.2 Hasil

4.2.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji sebuah model regresi dari tiap variabel terikat dan variabel bebas dapat berdistribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui sebuah data dalam model regresi terdistribusi secara normal atau tidak menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dimana jika Asymp. Sig > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa residual menyebar secara normal begitupun sebaliknya. Adapun uji normalitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

♦ NPar Tests

[DataSet0]

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	105116491.3
Most Extreme Differences	Absolute	.163
	Positive	.137
	Negative	-.163
Kolmogorov-Smirnov Z		.978
Asymp. Sig. (2-tailed)		.294

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov didapatkan hasil sebesar 0.294 > 0.05 yang artinya berdistribusi normal antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja modal dan kinerja keuangan pemerintahan sesuai dengan ketentuan nilai Asymp. Sig > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal begitupun sebaliknya.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan pengujian dalam variabel yang dilakukan untuk menemukan adanya korelasi antar variabel bebas yang dapat dilakukan dengan kriteria pengujian menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Uji multikolinearitas juga melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu metode regresi linear berganda. Jika terdapat korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel bebasnya maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Menurut model VIF ini suatu model regresi terbebas dari masalah multikolinearitas apabila memiliki nilai tolerance > 0.10 dan VIF < 10 namun jika tolerance < 0.10 dan VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas. Adapun uji multikolinearitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	160629234.9	25468982.66		6.307	.000		
PAD	.151	.017	.821	8.639	.000	.974	1.027
DAU	-3.980E-006	.000	-.018	-.187	.853	.965	1.036
Belanja Modal	-2.369E-009	.000	-.188	-2.000	.054	.991	1.009

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil dari uji multikolinearitas untuk nilai tolerance pada variabel pendapatan asli daerah sebesar 0.974; variabel dana alokasi umum sebesar 0.965; dan variabel belanja modal sebesar 0.991 terhadap variabel kinerja keuangan. Untuk nilai VIF yang diperoleh pada variabel pendapatan asli daerah sebesar 1.027; variabel dana alokasi umum sebesar 1.036; dan variabel belanja modal sebesar 1.009 terhadap variabel kinerja keuangan pemerintahan yang artinya tidak menunjukkan terjadinya multikolinearitas dalam model regresi yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji glejser dilakukan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam suatu model regresi. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau mengalami homoskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan atas uji heteroskedastisitas sebagai berikut:

1. Jika nilai Sig. (2-tailed) < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas
2. Jika nilai Sig. (2-tailed) > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	66642719.05	15648316.84		4.259	.000
PAD	.009	.011	.145	.861	.396
DAU	-6.779E-006	.000	-.088	-.518	.608
Belanja Modal	1.321E-009	.000	.302	1.815	.079

a. Dependent Variable: ABS_RES

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan uji glejser pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi untuk variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 0.396; variabel Dana Alokasi Umum sebesar 0.608 dan variabel Belanja Modal sebesar 0.079. Dari tingkat signifikansi tersebut variabel independen lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antar anggota observasi yang diurutkan, berdasarkan waktu (time series) atau ruang data (cross section). Konsekuensi dari adanya autokorelasi dalam suatu model regresi adalah varians sampel tidak dapat menggambarkan varians populasinya. Dalam menguji adanya autokorelasi dapat menggunakan uji run test apabila nilai Asymp. Sig (2- tailed) > 0.05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Syarat dalam uji autokorelasi:

1. Nilai Asymp. Sig (2-tailed) > 0.05 maka berkesimpulan tidak terjadi gejala autokorelasi
2. Nilai Asymp. Sig (2-tailed) < 0.05 maka berkesimpulan terjadi gejala autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.848 ^a	.718	.692	109933458.0	2.172

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, PAD, DAU

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil uji autokorelasi Durbin Watson, nilainya 2.172 sehingga berada diantara 1,6120 sampai 2,388. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengujian ini tidak terjadi gejala autokorelasi antara variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja modal dan kinerja keuangan pemerintahan.

4.2.2 Uji Hipotesis

a. Uji T

Uji t dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh signifikan satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen atau variabel terikat Kinerja Keuangan dengan taraf signifikansi kurang dari 0.05 atau 5%.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	160629234.9	25468982.66		6.307	.000
	PAD	.151	.017	.821	8.639	.000
	DAU	-3.980E-006	.000	-.018	-.187	.853
	Belanja Modal	-2.369E-009	.000	-.188	-2.000	.054

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Pengujian koefisien variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2) dan Belanja Modal (X_3) dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan berikut:

- 1) Pengujian Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Nilai variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) sebesar $0.000 > 0.05$ artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan

- 2) Pengujian Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Nilai variabel Dana Alokasi Umum (X2) sebesar $0.853 > 0.05$ artinya Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan
- 3) Pengujian Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Nilai variabel Belanja Modal (X3) sebesar $0.054 > 0.05$ artinya Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan

b. Uji F

Uji F dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel independen, yaitu: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan.

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9.861E+17	3	3.287E+17	27.198	.000 ^b
	Residual	3.867E+17	32	1.209E+16		
	Total	1.373E+18	35			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

b. Predictors: (Constant), Belanja Modal, PAD, DAU

c. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji R² yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen dengan menggunakan nilai koefisien determinasi yang telah disesuaikan yaitu Adjusted R-Square. Koefisien determinasi yang telah disesuaikan (Adjusted R-Square) memiliki arti bahwa koefisien tersebut telah dikoreksi dengan memasukkan jumlah variabel dan ukuran sampel yang digunakan. Dengan menggunakan koefisien determinasi yang disesuaikan maka nilai koefisien determinasi yang disesuaikan tersebut dapat naik atau turun oleh adanya penambahan variabel baru dalam model.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.848 ^a	.718	.692	109933458.0

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, PAD, DAU

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi Adjusted R² sebesar 0,718 atau setara dengan 71,8% hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yakni Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), dan Belanja Modal (X3) memberikan pengaruh terhadap variabel dependen yakni Kinerja Keuangan Pemerintahan (Y) 71,8%, sedangkan sisanya sebesar 28,2,% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

4.2.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik analisis regresi yang digunakan merupakan analisis regresi linear berganda untuk melihat pengaruh seluruh variabel tersebut secara keseluruhan apakah terdapat pengaruh

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

antara variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Modal (BM) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	160629234.9	25468982.66		6.307	.000
PAD	.151	.017	.821	8.639	.000
DAU	-3.980E-006	.000	-.018	-.187	.853
Belanja Modal	-2.369E-009	.000	-.188	-2.000	.054

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Adapun interpretasi dari hasil model analisis persamaan regresi berganda tersebut menurut Ghozali (2021) sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 0,000 artinya jika seluruh variabel independen bernilai konstan, maka nilai variabel Kinerja Keuangan Pemerintahan adalah 0,000.
2. Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,000 memiliki arti apabila variabel independen lainnya selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam keadaan konstan, maka setiap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1% akan menaikkan nilai variabel Kinerja Keuangan Pemerintahan sebesar 0,000.
3. Koefisien regresi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0,853 memiliki arti apabila variabel independen lainnya selain Dana Alokasi Umum (DAU) dalam keadaan konstan, maka setiap kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 1% akan menaikkan nilai variabel Kinerja Keuangan Pemerintahan sebesar 0,853.
4. Koefisien regresi Belanja Modal (BM) sebesar 0,054 memiliki arti apabila variabel independen lainnya selain Belanja Modal (BM) dalam keadaan konstan, maka setiap kenaikan Belanja Modal (BM) sebesar 1% akan menaikkan nilai variabel Kinerja Keuangan Pemerintahan sebesar 0,054.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah terdapat pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2018-2021. Sesuai dengan hasil dan analisis data yang telah dilaksanakan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2018-2021; Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2018-2021; Belanja Modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2018-2021; Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2018-2021; serta Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2018-2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018. (2018). *Tentang Klasifikasi Anggaran*. 48–59.
- Haryamto, M. L., Suprianto, E., Mahfudh, Saleh, H., & Saleh, M. Y. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Dengan Pandemi Covid-19 Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintahan Provinsi Di Indonesia Tahun. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 000, 396–409.
- Statistik, B. P. (n.d.). *Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2019-2022*. From Badan Pusat Statistik Provinsi Bali: <https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/1/OTcjMQ==/ringkasan-realisasi-anggaranpendapatan-dan-belanja-daerah--apbd--kabupaten-kota-di-provinsi-bali--20192022.html>